



**DINAS SOSIAL
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2025**

***Jl. Brigjen Piola Isa Kelurahan Dulomo Selatan Kecamatan Kota
Utara Kota Gorontalo***

Email: dinsosprovgto34@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

ATAS LAPORAN KINERJA DINAS SOSIAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2025 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Sosial Provinsi Gorontalo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keadaan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Gorontalo, 13 Maret 2026
Plh. Kepala Biro Organisasi,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN TATA LAKSANA DAN PELAYANAN PUBLIK



RENGGAPRANATA ARADHEA, S.Kom

yang diterbitkan oleh BSrE.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Laporan kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial, Provinsi Gorontalo Tahun 2025 disusun berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2025. LAKIP Dinas Sosial, Provinsi Gorontalo Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang realisasi dan capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025, tingkat pencapaian yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo dan masyarakat secara keseluruhan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gorontalo, 30 Maret 2026

KEPALA DINAS



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas



REFLIN BUATA, SE, M.Ec.Dev

yang diterbitkan oleh BSrE.

REFLIN BUATA, SE, M.Ec.Dev

Pembina Utama Madya
NIP. 197612282000121002

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo yang dihasilkan di tahun 2025, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sasaran peningkatan kapasitas dan keterampilan keluarga miskin dan rentan melalui pendampingan dan penyediaan kebutuhan dasar
2. Sasaran peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan
3. Sasaran peningkatan perlindungan dan layanan jaminan sosial bagi fakir miskin dan kelompok rentan lainnya
4. Sasaran kemampuan penduduk miskin, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok marjinal lainnya dalam pemenuhan hak dasar.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo ke depan, sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan kebijakan peraturan tentang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial
2. Meningkatkan koordinasi antara pihak yang terkait agar pengevaluasian terhadap program-program yang telah dijalankan dapat berjalan dengan tujuan yang telah ditetapkan
3. Mengoptimalkan pembinaan kepada PMKS dengan sumberdaya yang ada

4. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui usulan penambahan pegawai PNS, pembinaan, pendidikan, dan pelatihan dalam upaya pemenuhan kebutuhan SDM yang lebih profesional baik untuk pegawai PNS dan non PNS
5. Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan program/kegiatan
6. Lebih meningkatkan kinerja PNS dan Non PNS untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	v
LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. STRUKTUR ORGANISASI	2
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	5
C. ISU STRATEGIS	6
D. KEADAAN PEGAWAI	6
E. KEADAAN SARANA DAN PRASARANA	14
F. KONDISI KEUANGAN	15
G. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
A. RENCANA STRATEGIS	18
B. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	19
C. STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	21
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA	24
E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	26
F. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025	28
G. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS	28
H. INSTRUMEN PENDUKUNG	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	43
A. CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL PROVINSI GORONTALO	43
B. REALISASI ANGGARAN	84
BAB IV	88
PENUTUP	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	8
Jumlah Aparatur Dinas Sosial Provinsi Gorontalo	8
Tabel 1. 2	9
Jumlah Aparatur di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo	9
menurut tingkat Pendidikan	9
Tabel 1. 3	9
Jumlah Aparatur Dinas Sosial Provinsi Gorontalo	9
menurut Komposisi Struktur Administrasi	9
Tabel 1. 4	14
Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Provinsi Gorontalo	14
Tahun 2025	14
Tabel 2. 1	22
Strategis dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo	22
Tahun 2025-2029	22
Tabel 2. 2	24
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Provinsi Gorontalo	24
tahun 2025-2029	24
Tabel 2.3	26
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029	26
Tabel 2. 4	28
Target Belanja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo APBD Perubahan Tahun 2025	28
Tabel 2. 5	29
Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Dinas Sosial	29
Provinsi Gorontalo	29
Tabel 3. 1	35
Skala Nilai Peringkat Kinerja	35
Tabel 3. 2	36
Sasaran Strategis Dinas Sosial Provinsi Gorontalo	36
Tahun 2025	36
Tabel 3. 3	37
Sasaran Strategis Dinas Sosial Provinsi Gorontalo	37
Tahun 2025	37
Tabel 3. 4	38
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Strategis Dinas Sosial	38
Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target	38
jangka Menengah dalam Dokumen Renstra	38
Tabel 3. 5	43
Analisis Efisiensi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo	43

DAFTAR GAMBAR

Catalog

Gambar 1.1.	4
Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo	4
Gambar 1. 2	10
Grafik Pejabat Struktural Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2025	10
Gambar 1. 3	11
Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2025	11
Gambar 1. 4	12
Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2024	12
Gambar 1. 5	13
Diagram Profil Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2025	13
Gambar 2. 1	31
Aplikasi Monitoring Dan Evaluasi Pemda Provinsi Gorontalo	31
Gambar 2. 2	32
Aplikasi Pengelolaan Data Sistem Informasi Pemerintah Daerah	32
Gambar 2. 3	33
Aplikasi E- Data Sektor	33
Gambar 2. 4	34
Aplikasi new-siransija	34
Gambar 2. 5	35
Gambar 2. 6	35
Aplikasi Sidak Sosial	35

LAMPIRAN:

Lampiran 1 Struktur Organisasi

Lampiran 2 Matriks Renstra 2025-2029

Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Lampiran 4 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Lampiran 5 Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun
Sebelumnya

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP Dinas Sosial Provinsi Gorontalo merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dengan tujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu diantara beberapa prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Gorontalo diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Sosial Provinsi Gorontalo
2. Mendorong Dinas Sosial Provinsi Gorontalo di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Sosial Provinsi Gorontalo di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

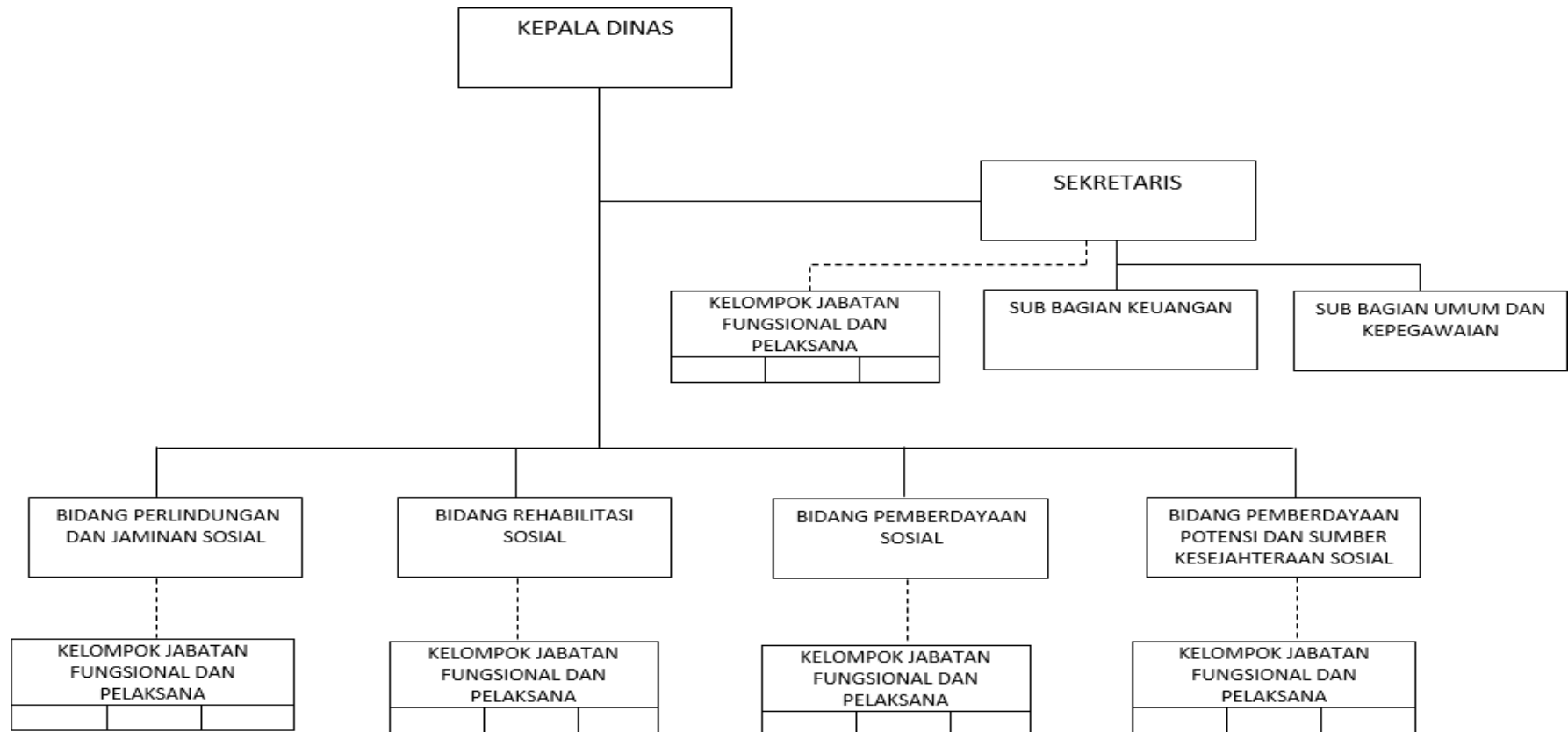
A. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Sosial Provinsi Gorontalo mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial
- f. Bidang Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini

Gambar 1. 1
Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo



Sekretaris Dinas	Kabid Rehsos	Kabid Linjamsos	Kabid Dayasos	Kabid PPSK

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2000 tentang terbentuknya Provinsi Gorontalo maka dibentuklah Badan, Dinas dan Biro dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Dinas Sosial Provinsi Gorontalo melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Daerah. Dinas Sosial Provinsi Gorontalo mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Dinas Sosial Provinsi Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Kelembagaan dan Kemitraan yang berada dibawah tanggung jawab Gubernur.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Sosial Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Rehabilitasi Sosial
- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang Pemberdayaan Sosial
- d. Pelaksanaan kebijakan dibidang Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- e. Pelaksanaan kebijakan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria dibidang sosial yang mencakup Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;

- f. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, bidang Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, bidang Rehabilitasi Sosial, bidang Pemberdayaan Sosial, bidang Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

Pada akhir tahun 2025, Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan penataan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Dan pada tahun 2026, pelaksanaan dari hasil penataan kelembagaan tersebut sebagaimana Peraturan Gubernur Gorontalo nomor 34 Tahun 2025 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Sosial bergabung dengan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga nomenklatur Dinas Sosial menjadi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo.

C. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis diperoleh dari identifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat baik internal maupun eksternal yang dapat menciptakan peluang dan ancaman dimasa lima tahun mendatang, maka isu-isu strategis yang akan ditangani oleh Dinas Sosial Provinsi Gorontalo melalui RPD Tahun 2023-2026 diantaranya adalah :

1. Cakupan Perlindungan Sosial belum menjangkau semua kelompok masyarakat yang memerlukan pelayanan Kesejahteraan Sosial.
2. Belum optimalnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
3. Kapasitas dan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

D. KEADAAN PEGAWAI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Provinsi Gorontalo didukung oleh sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang terlibat di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo berjumlah 70. Ditinjau dari sisi jabatan maka pegawai di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo terbagi dalam Jabatan Struktural dan

Jabatan Fungsional. Adapun susunan kepegawaian di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dapat di lihat pada table 1.1, sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Jumlah Aparatur Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

NO	JABATAN STRUKTURAL / JABATAN FUNGSIONAL	JMLH	PANGKAT/GOL. RUANG	JMLH	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	Kepala Dinas	1	Pembina Utama Muda / IV c	1	S2
2	Sekretaris	1	Pembina Tingkat 1 / IV b	1	S1
3	Kepala Bidang	4	Pembina Tingkat 1 / IV b	1	S2
			Pembina Tingkat I / IV b	1	S1
			Pembina IV / a	2	
4	Kepala Sub Bagian	2	Penata Tkt 1/ III d	2	SI
			Penata / III c		
5	Jabatan Fungsional	10	Pembina /IV a	2	S2
			Penata Tkt I / III d	1	
			Penata Muda Tkt I / III b	1	
			Penata Tkt I / III d	9	S1
6	Pelaksana	46	Pembina Tingkat 1 / IV b	1	S2
			Pembina / IV a	2	S2
			Penata Tkt. I/ III d	1	S2
			Penata Tkt. I/ III d	19	S1
			Penata / III c	6	S1
			Penata Muda Tingkat I / III b	5	S1
			Penata Muda Tingkat I / III b	1	D III
			Penata Muda / III a	5	S1
			Pengatur Tingkat I/ II d	3	SMA/SEDERAJAT
			Pengatur / II c	1	SMA/SEDERAJAT
			Pengatur Muda Tkt 1/ II b	3	SMA/SEDERAJAT
			Pengatur Muda/ II a	0	SMA/SEDERAJAT

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Dinas Sosial 2025

Tabel 1. 2
Jumlah Aparatur di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo
menurut tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata 3	-
2	Strata 2	10 Orang
3	Strata 1	46 Orang
4	Diploma/D3	1 Orang
5	Diploma/D1	-
6	SMU/Sederajat	11 Orang
7	SMP/Sederajat	-
	Jumlah	68 Orang

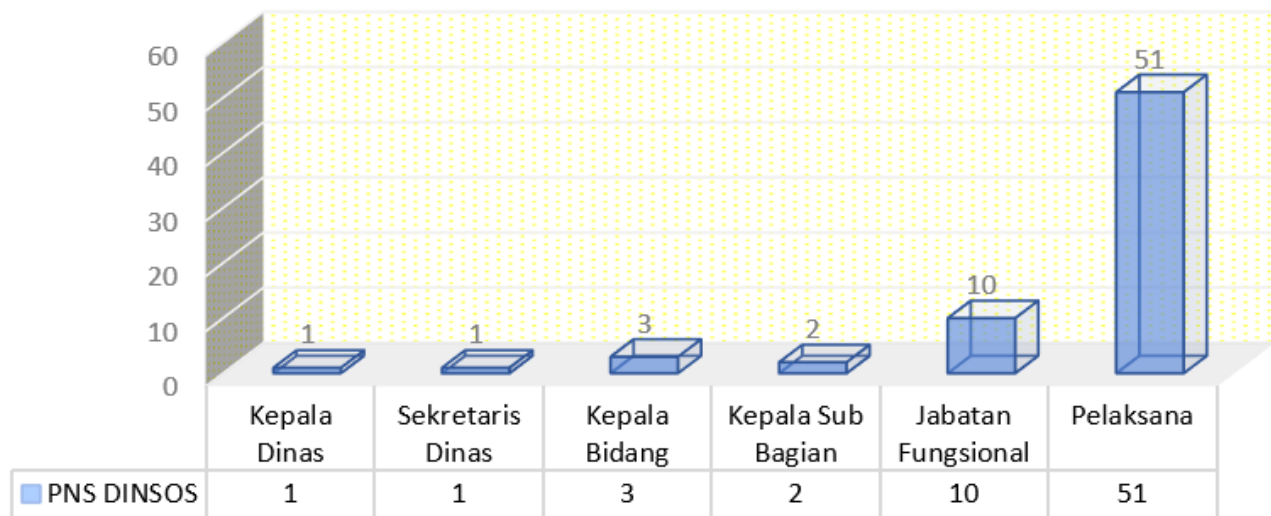
Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Dinas Sosial 2025

Tabel 1. 3
Jumlah Aparatur Dinas Sosial Provinsi Gorontalo
menurut Komposisi Struktur Administrasi

No	Komposisi Struktur Administrasi	Jumlah
1	Kepala Dinas	1 orang
2	Sekretariat	19 Orang
3	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	15 Orang
4	Bidang Rehabilitasi Sosial	14 Orang
5	Bidang Pemberdayaan Sosial	12 Orang
6	Bidang Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	7 Orang
	Jumlah	68 Orang

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Dinas Sosial 2025

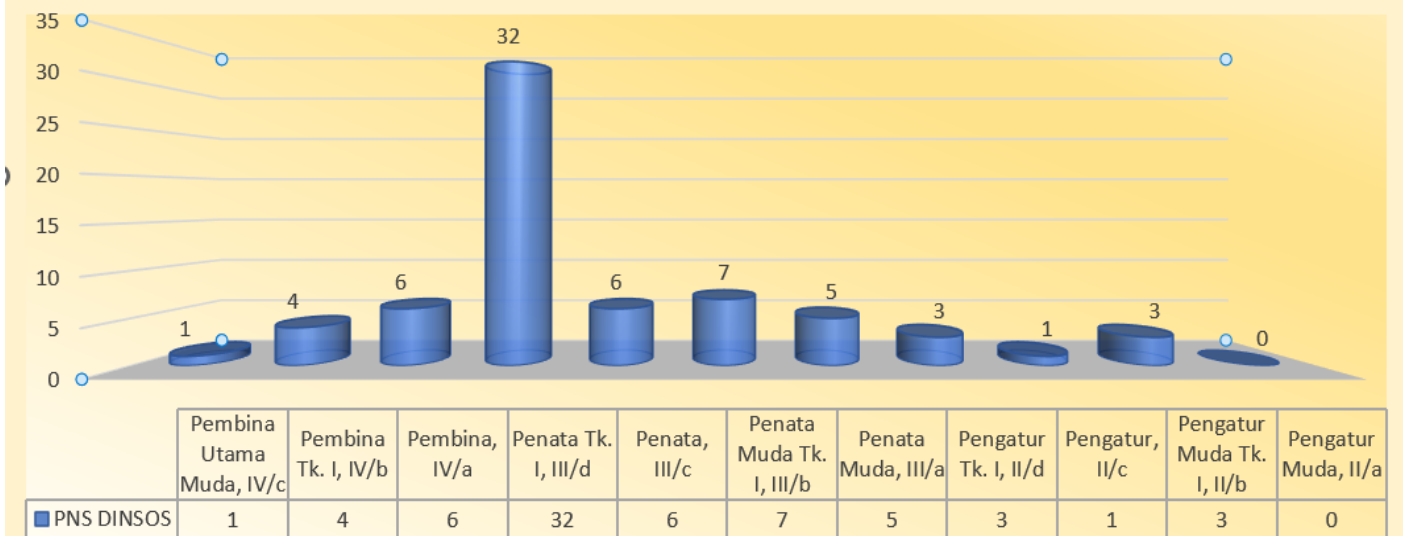
Pejabat Struktural Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2025



Gambar 1. 2
Grafik Pejabat Struktural Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa masih terdapat kesenjangan pemenuhan kebutuhan pegawai di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo terutama untuk Jabatan Fungsional Umum agar dapat memberikan kinerja secara maksimal serta pegawai di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo.

PROFIL KEPEGAWAIAN BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN DINAS SOSIAL PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025

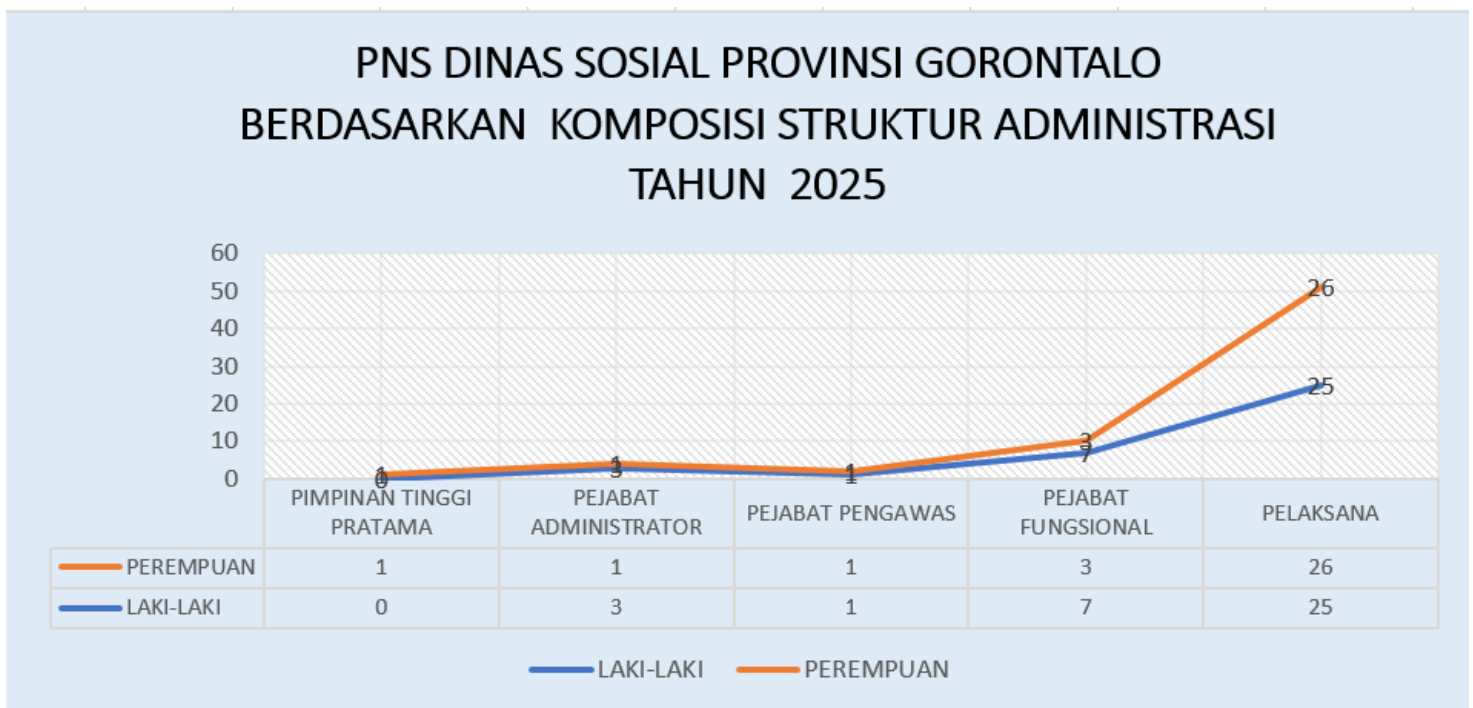


Gambar 1. 3
Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Pangkat dan Golongan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa rata-rata golongan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo sebagian besar merupakan pegawai Golongan III.

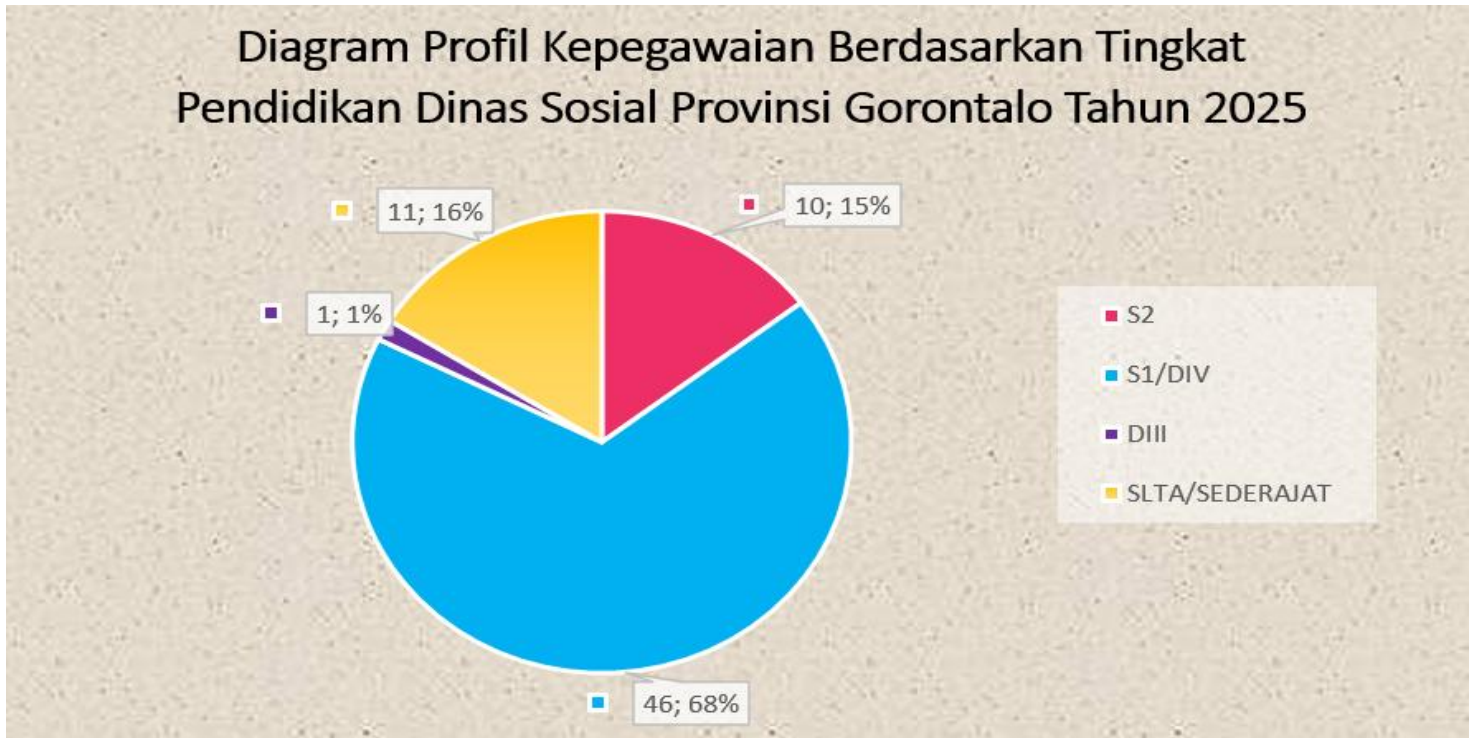
Selanjutnya, profil kepegawaian berdasarkan eselon dan jenis kelamin Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1. 4
Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2025



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo sudah mencerminkan keseimbangan gender dimana jumlah pegawai dan perempuan baik yang menduduki jabatan struktural (Eselon), dan fungsional umum jumlahnya sudah seimbang.

Profil kepegawaian Dinas Sosial Provinsi Gorontalo berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar 1.5, sebagai berikut:



Gambar 1. 5
Diagram Profil Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2025

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, kondisi pegawai di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo lebih banyak didominasi oleh Sarjana S1 terkait dengan jabatan struktural dan pelaksana yang membutuhkan tingkat pendidikan sarjana

E. KEADAAN SARANA DAN PRASARANA

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di - Dinas Sosial Provinsi Gorontalo sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 4
Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Provinsi Gorontalo
Tahun 2025

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan/Kondisi
1.	Televisi	5 Buah	Baik
2	CCTV	1 Unit	Baik
3	Komputer	15 Unit	Baik
4	Lemari Besi	8 Buah	Baik
5	Alat Pemadam Kebakaran	3 Buah	Baik
6	Kursi Tamu	2 Set	Baik

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

F. KONDISI KEUANGAN

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo pada tahun 2025 berasal dari APBD Daerah Provinsi Gorontalo. Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Sosial Provinsi Gorontalo mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.897.897.120,- dengan rincian belanja Belanja Pegawai Rp.8.622.320.192, Belanja Barang dan Jasa Rp. 8.440.243.928,- Belanja Modal Rp. 694.833.000, Belanja Bantuan Sosial Rp. 4.690.500.000,- Belanja Hibah Rp.450.000.000,- yang didukung oleh 7 Program dan 18 Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo.

G. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Provinsi Gorontalo tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I (PENDAHULUAN)

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LAKIP/manfaat LAKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LAKIP

Bab II (PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA)

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

Bab III (AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN)

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi

dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

Bab IV (PENUTUP)

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2023-2026

Memasuki Tahun 2024, Dinas Sosial Provinsi Gorontalo menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026. Renstra Dinas Sosial Provinsi Gorontalo merupakan manifestasi komitmen Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Gorontalo yang tertuang dalam RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2017-2022). RPD Pemerintah Provinsi Gorontalo merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan selama empat tahun, sesuai Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 70 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode empat tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi, kebijakan dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Sesuai Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun

2023-2026 dan Peraturan Gubernur Nomor 15 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026

B. Rencana Strategi 2025-2029

Dengan memperhatikan arahan RPJPD 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, serta mempertimbangkan permasalahan pembangunan serta isu dan tantangan pembangunan, Gubernur Gorontalo telah menetapkan Visi pembangunan Provinsi Gorontalo tahun 2025-2029 adalah: **“Gorontalo Maju dan Sejahtera”**

Visi Provinsi Gorontalo tahun 2025-2029 tersebut mengandung 2 (dua) unsur penting, yaitu : **Gorontalo Maju**, adalah kondisi daerah yang maju, yang ditandai dengan posisi dan keadaan yang lebih baik dan lebih maju dari kondisi saat ini yang diukur dengan peningkatan daya saing produksi sektor pariwisata, pertanian dan perikanan, serta meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar serta kualitas sumberdaya manusia.

Gorontalo Sejahtera, yaitu 1) Kondisi daerah yang sejahtera, ditandai dengan meningkatnya Indeks Modal Manusia (IMM), Indeks Pembangunan Manusia, Peningkatan Ekonomi, Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita, penurunan persentase kemiskinan dan penurunan angka pengangguran; 2) Terus membaiknya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance & clean government), dan terciptanya masyarakat berbudaya, beriman dan bertaqwa dengan menjamin stabilitas keamanan dan ketertiban untuk keberlangsungan pembangunan. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi dan terus memperoleh predikat sebagai daerah teraman.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka pencapaian visi “Gorontalo Maju dan Sejahtera” maka ditetapkan 5 (lima) Misi pembangunan, yaitu:

1. Mengoptimalkan posisi strategis Gorontalo Terhadap IKN Nusantara untuk akselerasi pembangunan
2. Melakukan akselerasi agar Gorontalo keluar dari lima provinsi termiskin di Indonesia.

3. Menstimulasi program kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat
4. Mewujudkan infrastruktur pelayanan publik yang merata dan berkualitas

Menjadikan “Adat Bersendikan Syara, Syara Bersendikan Kitabullah” sebagai spirit pembangunan dan kehidupan masyarakat.

C. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

a) Tujuan

Pada Renstra Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 telah dirumuskan 1 (satu) tujuan yang menggambarkan 1 (satu) urusan yang diampu yaitu urusan sosial. Tujuan yang diformulasikan sebagai acuan untuk mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi untuk kurun waktu satu sampai berakhirnya masa renstra Dinas Sosial Provinsi Gorontalo tahun 2025-2029 adalah :

“Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif dengan Indikator Tujuan Indeks Kesejahteraan Sosial”

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

b) Sasaran

Sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran spesifik dari tujuan yang ingin dicapai. Sasaran Dinas Sosial Provinsi Gorontalo selang tahun 2025 – 2029 adalah

“Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat dengan Indikator Sasaran Persentase masyarakat rentan yang mendapatkan perlindungan social”

Dalam menentukan indikator sasaran dan target dalam 5 tahun ke depan dijelaskan formulasi perhitungan indikator yakni :

Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan		Keterangan
Persentase masyarakat rentan yang mendapatkan perlindungan sosial.	$\frac{\text{Jumlah masyarakat rentan yang mendapatkan perlindungan social}}{\text{Jumlah masyarakat rentan yang membutuhkan perlindungan sosial}}$	X 100	Data Pembagi : data masyarakat rentan yang berada pada Desil 1 sampai Desil 4

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator kinerja tujuan/sasaran dan target kinerja perangkat daerah disajikan pada Tabel 3.1 berikut ini

TABEL 3.1

TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS SOSIAL PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
- Terwujudnya percepatan penuntasan kemiskinan dan meningkatna cakupan perlindungan social bagi seluruh penduduk Gorontalo secara berkeadilan dan inklusif	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang inklusif		Indeks Kesejahteraan Sosial	52,23	53,79	55,40	57,06	58,77	60,53	
		Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Masyarakat	Persentase masyarakat rentan yang mendapatkan perlindungan sosial	20	21,24	21,94	23,18	24,42	26,19	

D. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- **Strategi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029**

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah dan upaya yang akan dilaksanakan, di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan, fokus, serta program/kegiatan/subkegiatan, guna menghadapi dinamika lingkungan dan mencapai tujuan serta sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Selain itu, strategi juga disusun berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Berikut ini adalah proses perumusan strategi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo yang meliputi antara lain:

Tabel 2 .1 Penentuan Strategi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

No	Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
1	Belum optimalnya penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial terkhususnya pada kelompok rentan	1.Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang inklusif 2.Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Masyarakat	1. Menetapkan data tunggal dalam penanganan kemiskinan dan perlindungan social 2. Penetapan Kewenangan dalam penanganan Kemiskinan dan perlindungan social 3. Penetapan Program dalam penanganan kemiskinan
2	Belum tersedianya panti sosial sebagai pelaksanaan teknis dalam upaya perlindungan, pengasuhan, pengembangan dan rehabilitas social		
3	Belum optimalnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang tersedia, terutama untuk tenaga teknis bidang sosial, pelatih dan tenaga teknis lainnya.		
4	Masih kurang akuratnya data PMKS.		

- **Arah Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029**

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Selain itu arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan akar masalah pembangunan perangkat daerah. Dinas Sosial Provinsi Gorontalo memiliki arah kebijakan yang selaras dengan NSPK dan Arah Kebijakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2

ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS SOSIAL PROVINSI GORONTALO

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	- UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial - Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	1. Pengentasan kemiskinan terutama pada perdesaan dan daerah afirmasi melalui perlindungan sosial adaptif 2. Pendekatan pemanfaatan satu data tunggal sosial ekonomi sebagai baseline data sasaran penerima manfaat 3. Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk kelompok rentan seperti perempuan kepala keluarga, lansia, dan disabilitas. 4. Peningkatan kapasitas keluarga miskin, terutama yang memiliki anak, penyandang disabilitas, dan/atau lansia 5. Peningkatan cakupan jaminan Kesehatan	1. Mengoptimalkan perlindungan sosial menuju perlindungan sosial yang adaptif sesuai dengan peran teknis Organisasi Perangkat Daerah. 2. Peningkatan kapasitas SDM kesejahteraan sosial 3. Penguatan data penanganan kemiskinan 4. Peningkatan kualitas dan mutu layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial 5. Penguatan kapasitas kelembagaan social	

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA

**Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Provinsi Gorontalo
Tahun 2023-2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula/Penjelasan
1.	Meningkatnya Perlindungan sosial bagi masyarakat	Persentase warga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial	Pelindungan sosial kepada warga miskin meliputi : g. Pemberian perlindungan dan jaminan sosial kepada penduduk miskin; h. Penanganan bagi fakir miskin agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya melalui pemberian bantuan sembako; i. Pemberian pemberdayaan sosial bagi penduduk miskin melalui bantuan stimulan usaha ekonomi produktif; j. Pemberian pelayanan rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) diantaranya penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial, gelandangan dan pengemis, korban penyalahgunaan NAPZA, dan penyandang HIV/AIDS. k. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial memerlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perorangan, keluarga, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, LKS, maupun LKS asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu dan berkelanjutan l. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana alam dan bencana sosial serta bencana nonalam sehingga terganggu fungsi sosialnya Rumus : Jumlah warga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial ×

			100 % Jumlah warga miskin yang membutuhkan perlindungan sosial Jumlah anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, gelandang dan pengemis yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial didalam panti _____ × 100 % Jumlah anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, gelandang dan pengemis yang membutuhkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti Jumlah PSKS perseorangan yang meningkat kapasitasnya _____ × 100 % Jumlah PSKS perorangan yang ada Jumlah korban bencana alam dan sosial yang tertangani dan terlayani _____ × 100 % Jumlah korban bencana alam dan sosial yang ada
2.	Meningkatnya kualitas urusan penunjang pemerintahan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	-IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Indeks Kepuasan Masyarakat di tetapkan melalui survey kepuasan masyarakat, yang merupakan nilai hasil akhir dari penjumlahan nilai per unsur dan jumlah responden. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permenpan RB No 14 Tahun 2017. rumus : Skor KM Total = $(Total\ nilai\ semua\ unsur) / (jlh\ responden \times jlh\ unsur) \times 100/4$ Sumber Data : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan Tujuan dan sasaran Strategis tersebut maka uraian Indikator Kinerja Utama mewujudkan Strategis yang telah ditetapkan, seperti pada table berikut :

Tabel 2. 3
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Provinsi Gorontalo
Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Indikator	Metodologi/ Definisi Operasional	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	Nilai IKESOS Provinsi : $\frac{\sum_{i=1}^n \text{IKESOS}_{\text{Kabupaten/Kota}}}{n}$	- Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. - Untuk perhitungan Indeks Kesejahteraan social terbagi dalam 3 dimensi, yaitu dimensi kebutuhan dasar 27%, dimensi peranan social 31% dan dimensi keberdayaan ekonomi 42%. - Dimana n merupakan banyak kabupaten/kota.	Kemensos
2.	Meningkatnya Perlindungan sosial bagi masyarakat	Persentase masyarakat rentan yang mendapatkan perlindungan social	1. Jumlah masyarakat rentan yang mendapatkan perlindungan social (BLP3G, UEP, Rehsos, PSKS, Korban Bencana) $\frac{\text{Jumlah masyarakat rentan yang membutuhkan perlindungan social}}{\text{Jumlah masyarakat rentan yang membutuhkan perlindungan social}} \times 100$	- Masyarakat rentan adalah populasi yang tinggal dalam kemiskinan tanpa memiliki akses pada rumah yang aman, ketersediaan air, kebersihan, dan gizi. Mereka juga termasuk orang yang mengalami stigmatisasi, diskriminasi, atau terpinggirkan oleh masyarakat dan bahkan dikriminalisasi dalam hukum dan kebijakan. - Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. - Metodologi Pelaksanaan Kegiatan berupa : - Program BLP3G merupakan bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi. - Program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau	- DTS EN - Dinas Sosial Kab/Kota - DTS EN

				pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan ekonomi, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha saling menguntungkan. • Anak Terlantar yakni anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial sehingga mengalami hambatan dalam tumbuh kembangnya secara optimal • Lanjut usia terlantar yakni seseorang yang telah mencapai usia lanjut (umurnya 60 Tahun Keatas) dan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak, baik dari segi fisik, mental, sosial maupun ekonomi. • Disabilitas terlantar yakni penyandang disabilitas yang tidak memiliki atau kehilangan pengasuh keluarga, atau pihak yang bertanggungjawab, serta hidup dalam kondisi sosial dan ekonomi yang kurang mendukung, sehingga tidak memenuhi kebutuhan dasar mereka secara layak. • Gelandangan adalah gelandangan merujuk pada orang yang tidak memiliki tempat tinggal tetap dan tidak memiliki tempat tinggal yang layak. • Pengemis adalah orang yang meminta-minta ditempat umum, dengan atau tanpa alasan tertentu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya • Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) sering kali tidak memiliki pendapatan yang stabil dan hidup bergantung pada belas kasihan orang lain. • Prosedur Pelayanan Rehabilitasi Sosial didalam Panti 1. Permohonan Klien 2. Asesment Dinas Sosial Kab/Kota 3.Rekomendasi Ke Dinas Sosial Provinsi dari Dinas Sosial Kab/Kota 4. Menelaah Rekomendasi 5. Persetujuan Penerimaan Klien didalam panti • Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam hal penyelenggaraan rehabilitasi sosial didalam panti yang menjadi	• Data • Regsosek • Dina • s Sosial • Kab/Kota • DTS • EN
--	--	--	--	--	--

			kewenangan provinsi dalam pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan atau pelayanan sosial. Data dikumpulkan berdasarkan hasil assement Kabupaten/Kota. • Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perseorangan adalah individu yang terdaftar dalam program pemberdayaan sosial dan mengalami peningkatan kapasitas dalam aspek sosial-ekonomi. Peningkatan kapasitas mencakup peningkatan kemampuan mandiri dalam kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Mekanisme Pelaksanaan : 1. Pendataan Awal : Data PSKS dikumpulkan saat individu terdaftar dalam program pemberdayaan sosial oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). 2. Pemantauan Berkala: Data perkembangan PSKS dicatat setiap triwulan melalui kunjungan lapangan dan laporan kegiatan. 3. Evaluasi Akhir Tahun: Di akhir tahun, dilakukan survei untuk mengukur sejauh mana kapasitas PSKS telah meningkat. • Bencana Alam adalah Peristiwa yang disebabkan oleh Alam seperti Gempa Bumi, Tsunami, Gunung Meletus, Banjir, Kekeringan, Angin Topan dan Tanah Longsor • Bencana Sosial adalah Peristiwa atau Rangkaian Peristiwa yang berasal dari interaksi anttar Manusia yang menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikosial serta terganggunya fungsi pelayanan publik. Konflik sosial. • Bencana Non Alam ialah bencana yang disebabkan oleh peristiwa yang disebabkan oleh non alam antara lain gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit. • Prosedur Pelaksanaan Pra Bencana yakni : Rekrutmen Tagana Pembentukan KSB Sosialisasi Penanggulangan Bencana Bakti Sosial	• Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) • Lembaga Sosial • Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) • Data Regsosek • Dinas Sosial Kab/Kota • Relawan (KSB, Tagana) • Dinas Sosial Kabupaten/kota
--	--	--	---	--

				Prosedur pelaksanaan penanganan saat bencana yakni Assesment Perhitungan luasan dampak Pernyataan Tanggap darurat dari Kepala daerah yang terdampak Penanganan Pelaporan Prosedur Pelaksanaan Pasca Bencana yakni Layanan Dampak Psikososial Rehabilitasi dan Rekonstruksi • Data Kinerja dikumpulkan melalui laporan kejadian bencana masing-masing kabupaten/kota.	
--	--	--	--	---	--

E.PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang menjadi pemicu dalam pencapaian target dan realisasi apa yang telah direncanakan dalam organisasi. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapi dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP).

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Gubernur sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Gubernur dan Pimpinan SKPD atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Tujuan

dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

- Sebagai wujud nyata komitmen antara Gubernur dan pimpinan SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- Sebagai dasar bagi Gubernur untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Gubernur Gorontalo dan Kepala Dinas dapat dilihat dalam lampiran pada akhir laporan kinerja ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Provinsi Gorontalo.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
Yang mengacu pada Renstra 2023-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	B
2.	Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat	Persentase (%) Masyarakat yang mendapatkan perlindungan sosial	100%

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Yang mengacu pada Renstra 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	52,23 %
2.	Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat	Persentase masyarakat rentan yang mendapatkan perlindungan sosial	20 %

F. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Sosial Provinsi Gorontalo melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni yang bersumber dari APBD sebesar Rp 22.897.897.120,- alokasi anggaran sebesar Rp. 22.897.897.120,- dengan rincian belanja Belanja Pegawai Rp.8.622.320.192, Belanja Barang dan Jasa Rp. 8.440.243.928,- Belanja Modal Rp. 694.833.000, Belanja Bantuan Sosial Rp. 4.690.500.000,- Belanja Hibah Rp.450.000.000,- yang didukung oleh 7 Program dan 18 Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

Target Belanja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

Di dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Provinsi

Gorontalo menetapkan target belanja setelah perubahan sebesar Rp 22.897.897.120,- dengan rincian belanja Belanja Pegawai Rp.8.622.320.192, Belanja Barang dan Jasa Rp. 8.440.243.928,- Belanja Modal Rp. 694.833.000, Belanja Bantuan Sosial Rp. 4.690.500.000,- Belanja Hibah Rp.450.000.000.

Tabel 2. 4
Target Belanja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo APBD Perubahan Tahun 2025

No	Uraian	Target	Realisasi	Persentase
1	Belanja Pegawai	Rp 8.622.320.192,-	Rp. 8.000.414.262,-	37,87 %
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 13.580.743.928,-	Rp. 12.430.839.689,-	58,84 %
3	Belanja Modal	Rp. 694.833.000,-	Rp. 693.238.430,-	3,28 %
	Jumlah	Rp. 22.897.897.120,-	Rp. 21.124.492.381,-	92,25 %

G. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS

Anggaran belanja langsung Tahun 2025 Dinas Sosial Provinsi Gorontalo yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5
Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

No	Sasaran	Anggaran (Rp)
1	<i>Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat dengan Indikator Sasaran Persentase masyarakat rentan yang mendapatkan perlindungan sosial</i>	
1	Dari Dana APBD	Rp 22.897.897.120,-

	Jumlah	Rp. 22.897.897.120,-
--	---------------	-----------------------------

H. INSTRUMEN PENDUKUNG

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2025, digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dengan membangun beberapa sistem informasi.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Gorontalo. Dinas Sosial Provinsi Gorontalo selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

Dalam konteks pengembangan informasi tersebut Dinas Sosial Provinsi Gorontalo membangun beberapa sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja baik dalam hal meningkatkan kapasitas Dinas Sosial Provinsi Gorontalo sebagai pelaksana menurunkan angka kemiskinan di daerah maupun dalam memberikan layanan kepada stakeholder.

Peralatan komputer yang termasuk dalam alat-alat kantor sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo sebagian besar telah tersambung dalam jaringan Local Area Network (LAN) baik tersambung dengan media Kabel UTP maupun WiFi. Pada tahun 2023 telah dibangun integrasi data yang disimpan dalam server yang terbagi dalam segmen-segmen bidang. Dalam rangka menunjang

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu bentuk layanan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, Dinas Sosial Provinsi Gorontalo membangun beberapa sistem informasi.

1. Sistem Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring dan Evaluasi Pelaporan (E-MONEP) dengan alamat akses <http://e-monep.gorontaloprov.go.id> Sistem Informasi Monev dikembangkan untuk mempermudah OPD dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan setiap OPD. Sistem ini sangat mendukung dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi dapat lebih mudah dilakukan secara transparan dan akuntabel :

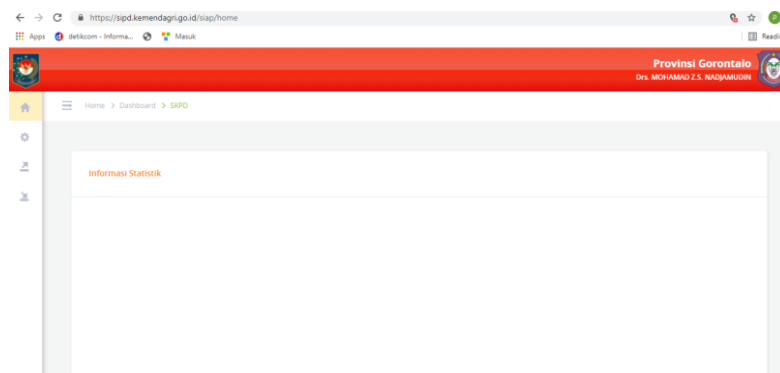


Gambar 2. 1
Aplikasi Monitoring Dan Evaluasi Pemda Provinsi Gorontalo

Sistem monev yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dalam usaha Pemerintah Provinsi Gorontalo meningkatkan akuntabilitas pembangunan mampu meningkatkan performa Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mewujudkan akuntabilitas pembangunan. Hal tersebut dibuktikan dengan penilaian yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dengan status akuntabilitas kinerja pembangunan yang baik.

2. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan alamat akses <https://sipd.kemendagri.go.id/siap/login> dikembangkan mulai tahun 2020 yang merupakan pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan data anggaran dengan tujuan untuk mengintegrasikan data perencanaan pembangunan yang berasal dari semua stakeholder penyedia data.

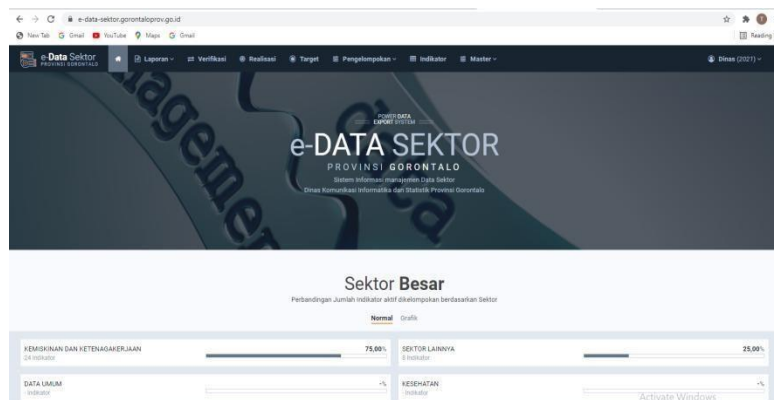


Gambar 2. 2
Aplikasi Pengelolaan Data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Sistem Aplikasi Dataku merupakan sistem pengelolaan data yang berusaha mengintegrasikan penyediaan data di masing-masing OPD sehingga mudah diakses oleh pengguna data dan mempermudah koordinasi penyediaan data untuk perencanaan dan penganggaran.

3. Sistem Informasi Manajemen Data Sektor

Sistem informasi manajemen data sector merupakan sistem yang dibangun Dinas Komunikasi dan Statistik Provinsi Gorontalo sebagai bentuk tanggung jawab atas data sektor dari setiap OPD. setiap OPD dapat mengakses dan menginput data sektor serta metadata masing-masing pada aplikasi e-Data Sektor dengan alamat : www.e-data-sektor.gorontaloprov.go.id.

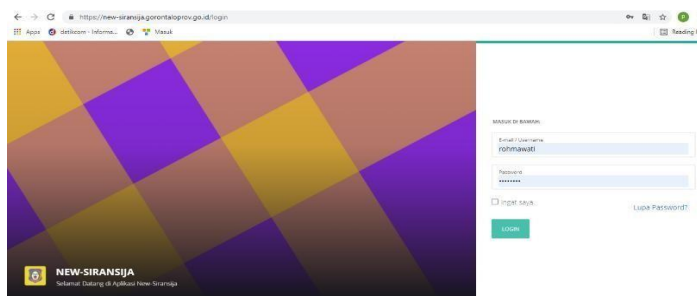


Gambar 2. 3
Aplikasi E- Data Sektor

4. Sistem Pengukuran Prestasi Kinerja (SIRANSIJA)

Sistem Pengukuran Prestasi Kinerja merupakan sistem yang dibangun Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo sebagai bentuk tanggung jawab atas penilaian prestasi kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi Gorontalo. setiap PNS dapat mengakses dan

menginput sasaran kinerja pegawai sampai laporan pelaksanaan kegiatan setiap hari, dengan alamat : e-siransija.gorontaloprov.go.id yang sudah digunakan dari tahun 2017 hingga saat ini yang sudah direvisi menjadi NEW SIRANSIJA dengan alamat : new-siransija.gorontaloprov.go.id



Gambar 2. 4
Aplikasi new-siransija

5. Aplikasi E- JPS

e-JPS ini adalah Sebagai alat kontrol, monitoring dan evaluasi program bantuan sosial (Jaring Pengaman Sosial) yang di salurkan oleh pemerintah baik yang didanai oleh APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kab/Kota.



Gambar 2. 5
Aplikasi e-JPS

6. Aplikasi Inovasi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

Tujuan Utama Aplikasi Sidak Sosial

Untuk mengatasi permasalahan selama ini yaitu belum optimalnya pengelolaan informasi, data dan Surat Izin Operasional (SIOP) Kelembagaan Sosial,

Manfaat Aplikasi Sidak Sosial

1. Memudahkan OPD khususnya bidang sosial dalam menghimpun data kelembagaan sosial
2. Proses pengelolaan SIOP kelembagaan sosial, penginputan data PMKS dan laporan bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
3. Tersedianya media informasi, data dan kelembagaan sosial yang aktual dan valid
4. Membantu Stakeholder/pihak terkait dalam mengakses informasi dan data.
5. Mengajukan SIOP Kelembagaan Sosial, penginputan data PMKS dan Laporan TKSK lebih efektif dan efisien karena dapat dilakukan secara online.



Sistem Informasi, Data Dan Kelembagaan Sosial (Sidak Sosial)

APLIKASI SIDAK SOSIAL dapat diakses pada Link :

<https://sidaksosial.cbudi.my.id/auth>

The image shows a web browser window displaying the 'sidaksosial.tridev.my.id/Permohonan' page. A modal window titled 'Form Permohonan' is open, allowing users to submit an application. The form is divided into two main sections. The left section contains fields for personal and institutional information: NPWP (highlighted with a red box), Nama Pemilik, Nama Lembaga, Jenis Lembaga, Alamat Lembaga, Nomor Surat Permohonan, and Surat Permohonan Pembuatan/Perpanjangan SIOP. The right section contains fields for notary and document information: Nomor Akta Notaris, Tanggal Akta Notaris, Nama Notaris, Usaha-Usaha Kesejahteraan, Tanggal Surat Permohonan, Fotocopy KTP Ketua LKS, and Fotocopy NPWP LKS. There are also buttons for 'Choose File' and 'No file chosen' for the document uploads. The background shows a sidebar with navigation options like 'Dashboard', 'Data Permohonan', 'Status Permohonan', and 'Cetak SIOP'.

Gambar 2. 6 Aplikasi Sidak Sosial

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL PROVINSI GORONTALO

Dinas Sosial Provinsi Gorontalo telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3. 1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Kriteria	Interval Realisasi (%)	Kode
1	Sangat Baik	91 (= 100	Hijau Tua
2	Tinggi	76 (= 90	Hijau Muda
3	Sedang	66 (= 75	Kuning Tua
4	Rendah	51 (= 65	Kuning Muda
5	Sangat rendah	(= 50	Merah

Sumber: Permendagri nomor 86 tahun 2017

Dengan melihat persentase capaian kinerja yang dikelompokkan berdasarkan skala ordinal diatas, analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Pengukuran target kinerja dari tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk penurunan angka kemiskinan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi masyarakat	Persentase warga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial	100 %	100 %	100 %
2	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (76,61)	90,33	117,91

Tabel 3. 3
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program Tahun 2025		(%)
			Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	52,23	51,92	99,40%

	Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Masyarakat	Persentase masyarakat rentan yang mendapatkan perlindungan sosial	20%	45%	225%
--	--	---	-----	-----	------

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian tahun 2025 dengan tahun lalu

1. Realisasi Indikator Kinerja Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang memperoleh Perlindungan Sosial Tahun 2025 sejumlah 9.000 KPM jika dibandingkan tahun 2024 sebanyak 23.000 KPM x 4 Penyaluran atau Kinerja mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian dengan adanya realisasi capaian kinerja tahun 2025 ini menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menurunkan angka kemiskinan.
2. Realisasi Indikator Kinerja Persentase PSKS Perorangan dan Kelembagaan yang meningkat Kapasitasnya tahun 2025 sejumlah 15 Organisasi/Lembaga. Dan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi sejumlah 77 orang.
3. Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terlayani dan tertangani Tahun 2025 sejumlah 6659 orang (Bencana Alam), jika dibandingkan dengan tahun 2024 jumlah korban yang tertangani sebanyak 54.094 orang. Untuk bencana tahun 2025 Dinas Sosial Provinsi Gorontalo memberikan bantuan Korban kebakaran.

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian tahun 2025
dengan tahun lalu

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	
			2023	2024
1	Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi masyarakat	Persentase warga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial.	100 %	100 %
2	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	A (89,00)	A (90,33)

Tabel 3. 3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian tahun 2025
dengan tahun lalu

No	saran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja ujuan/Impact / Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2025		Capaian Kinerja Program Tahun 2024		ersentas e (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	52,23	51,92	-	-	-
	Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Masyarakat	Persentase masyarakat rentan yang mendapatkan perlindungan social	20%	45%	11 %	43,77%	397%

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Capaian kinerja tujuan strategis pemerintah Provinsi Gorontalo dari indikator kinerja persentase angka kemiskinan dibandingkan dengan target RPD dapat dilihat pada tabel 3.6 di bawah ini :

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2024 dengan Target jangka Menengah dalam Dokumen Renstra

No	Sasaran Strategis		Capaian 2024	Target Akhir Renstra	Capaian (%)
1	Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi masyarakat	Persentase warga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial.	100 %	100 %	100
2	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	A (90,33)	A (88,31)	102

Tabel 3. 4

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2025
dengan Target jangka Menengah dalam Dokumen Renstra

NO	Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator kinerja (tujuan / Impact /Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2025		Persentase
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
Urusan Sosial					
1	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	100%	100%	100%
		Persentase Pekerja Sosial / Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Layanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	100%	100%	100%
		Persentase Pekerja Sosial / Tenaga Kesejahteraan Sosial dan / atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	100%	100%	100%
		Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	100%	100%	100%
		Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	100%	100%	100%

2	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	100%	31,25%	31,25%
3	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya didalam panti	100%	98,91%	98,91%
		Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya didalam panti	100%	100%	100%
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya didalam panti	100%	100%	100%
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya didalam panti	100%	90%	90%
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya didalam panti	100%	100%	100%
		Persentase sarana prasarana yang disediakan bagi peyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan/atau gelandangan dan pengemis didalam panti yang layak dan sesuai standar	100%	100%	100%
		Persentase sarana prasarana bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang disediakan secara layak dan sesuai standar	100%	100%	100%

4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	7,97%	11,75%	147%
		Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	16,19%	36,42%	224%
		Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	100%	100%	100%
5	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam, social dan atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	100%	100%
		Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	18%	23%	126%
		Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan social	100%	100%	100%
		Persentase sarana prasarana bagi korban bencana yang disediakan sesuai standar	100%	100%	100%
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik	100%	100%	100%

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. **Penurunan angka kemiskinan dengan indikator Angka Kemiskinan**

Dinas Sosial Provinsi Gorontalo sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya menjabarkan sasaran kinerja Pemerintah Daerah yaitu penurunan angka kemiskinan sebagai salah satu Perangkat Daerah pengampu.

Angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo pada Maret 2023 tercatat sebesar 15,15 persen dan Persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo pada September 2024 sebesar 13,87 persen, turun 0,7 di bandingkan Maret 2024 sebesar 14,57 persen, turun 1,28 persen poin dari September 2023 yang berada pada angka 15,15 persen.

Sementara itu, jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 13,24 persen dan pada September 2025 sebesar 12,62 persen atau turun sebesar 0,62 poin di bandingkan Maret 2025. Dan turun sebesar 1,25 poin dibandingkan dengan angka kemiskinan pada September 2024.

Jumlah penduduk miskin pada September 2025 sebesar 155,76 ribu orang, berkurang 6,98 ribu orang terhadap Maret 2025. Persentase penduduk miskin di perkotaan pada September 2025 tercatat sebesar 4,46 persen, turun 0,22 persen poin dari kondisi Maret 2025 yang tercatat sebesar 4,68 persen. Sementara persentase penduduk miskin di perdesaan pada September 2025 tercatat sebesar 19,86 persen, turun 0,94 persen poin jika dibandingkan kondisi Maret 2025 yang tercatat sebesar 20,80 persen. Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo pada September 2025 tercatat sebesar Rp519.640,- /kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp404.784,- (77,9 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp114.856,- (22,1 persen).

Dalam menurunkan angka kemiskinan baik kemiskinan ekstrim maupun kemiskinan absolut di Provinsi Gorontalo, solusi yang dilakukan pemerintah melalui Dinas Sosial yaitu dengan memberikan bantuan kepada masyarakat melalui Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Bantuan untuk Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G)

- b. **Sasaran** *“Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Masyarakat” terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran tersebut yaitu “Persentase Masyarakat Rentan Yang Mendapatkan Perlindungan Sosial”.*

Kendala:

Belum tersedianya Panti Sosial Anak Terlantar, Lanju Usia Terlantar, Disabilitas Terlantar, sebagai pelaksana teknis Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dalam upaya perlindungan, pengasuhan, pengembangan dan rehabilitas sosial untuk meningkatkan persentase dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak-haknya dan mampu berfungsi sosial

Strategi

- ✓ Perlunya Pembangunan Panti Sosial Terpadu untuk pemenuhan layanan rehabilitasi sosial dalam panti bagi pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Disabilitas Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis.
- ✓ Untuk saat ini kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Sosial Provinsi Gorontalo telah mengupayakan dalam rangka pemenuhan layanan rehabilitasi sosial dalam panti maka Pemerintah menyediakan tempat Rehabilitasi tetapi dalam status sewa/kotrak ruma

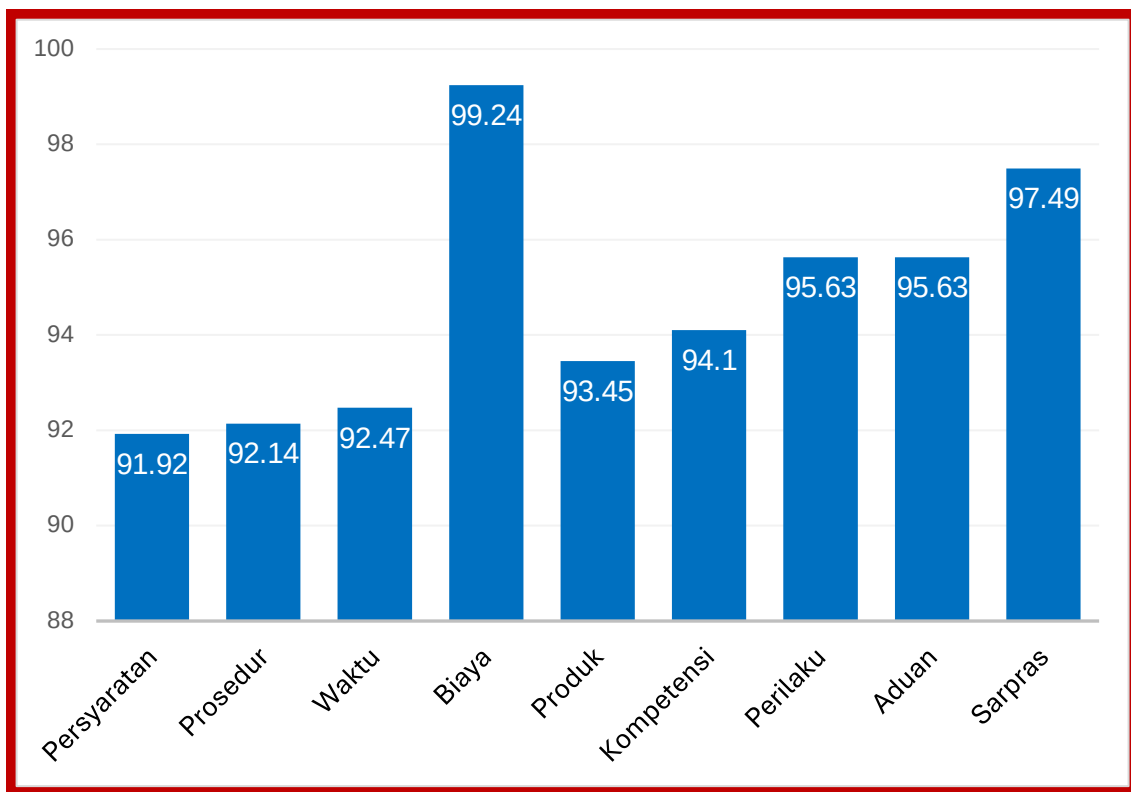
c. Indeks Kepuasan Masyarakat IKM

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

No	Jenis Layanan	Jumlah Responden	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM Per Jenis Layanan
1	Layanan Data dan Informasi	110	94.09	93.86	93.18	98.86	93.64	94.77	95.45	96.14	97.50	95.28
2	Layanan Pemberian Rekomendasi PUB & UGB	21	88.10	88.10	88.10	100	88.10	89.29	94.05	92.86	94.05	91.41
3	Layanan Resos Dasar Lansia dalam Panti	16	93.75	90.63	95.31	98.44	98.44	96.88	96.88	96.88	96.44	96.18
4	Layanan Pengakatan Anak melalui Masyarakat	17	86.76	88.24	92.65	100	92.65	89.71	94.12	75.59	98.53	93.18
5	Layanan Pengangkatan anak dalam Lembaga / Panti Asuhan Sosial Anak	15	86.67	90	86.67	100	91.67	93.33	95	93.33	98.33	92.78

6	Layanan Disabilitas Dalam Panti	19	90.79	90.97	92.11	98.68	94.74	94.74	96.05	97.37	100	95.03
7	Layanan Kelompok Rentan	31	91.94	93.55	94.35	100	94.35	95.97	97.58	95.16	96.77	95.52
Rerata IKM Per Unsur			91.92	92.14	92.47	99.24	93.45	94.10	95.63	95.63	97.49	94.67
IKM Unit Layanan			94.67									
Mutu Unit Layanan			A									

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut

Dari hasil analisis data SKM, kami mengidentifikasi bahwa aspek persyaratan layanan dan Prosedur Layanan merupakan dua isu yang paling sering disorot oleh masyarakat. Secara kuantitatif, kedua dimensi ini memiliki nilai yang masih dapat ditingkatkan. Persyaratan mendapatkan nilai terendah yaitu 91.92. Selanjutnya Prosedur Layanan yang mendapatkan nilai 92.14 adalah nilai terendah kedua.

Sementara, secara kualitatif dari kritik dan saran, kami menerima masukan yang menyatakan bahwa persyaratan layanan dan Prosedur Layanan harus lebih banyak di sosialisasikan agar kedepannya lebih bisa di pahami oleh pengguna layanan.

Atas dasar temuan tersebut, unit kerja kami menyusun rencana tindak lanjut yang tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan nilai SKM secara angka, tetapi lebih penting lagi, untuk menjawab permasalahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Fokus utama kami adalah melakukan sosialisasi terhadap persyaratan layanan dan Prosedur layanan agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh pengguna layanan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, berikut rencana tindak lanjut yang telah Kami susun untuk perbaikan layanan kedepan.

- d. Sasaran meningkatnya Kesejahteraan sosial yang inklusif dengan indikator Indeks Kesejahteraan Sosial. Pencapaian kinerja ini menyasar ke disabilitas terlantar dan lanjut usia terlantar. Di tahun 2025 target kinerja belum tercapai disebabkan oleh:

Kendala:

- Belum tersedianya panti sosial penyandang disabilitas terlantar dan lanjut usia terlantar;
- Gedung pelayanan rehabilitasi sosial dan penyandang disabilitas dan lanjut usia terlantar masih status sewa;
- Kurangnya pemahaman/kesadaran masyarakat dalam pemenuhan layanan kesejahteraan sosial.

Solusi ke depan:

Mengupayakan membangun gedung panti sosial terpadu.

- e. Sasaran meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat dengan indikator kinerja persentase masyarakat rentan yang mendapatkan perlindungan sosial. Masyarakat rentan meliputi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik, sosial, ekonomi atau lingkungan sehingga beresiko tinggi mengalami kekerasan dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Kelompok ini mencakup lansia, penyandang disabilitas, fakir miskin, perempuan, ibu hamil/menyusui serta korban bencana.

Faktor keberhasilan:

Pada tahun 2025, Dinas Sosial menetapkan target penanganan korban bencana dan layanan psiko sosial sejumlah 1200 jiwa. Dalam penanganannya tercapai sejumlah 6000

jiwa dengan dukungan sumberdaya yang ada.

Selanjutnya, faktor keberhasilan sasaran strategis ini didukung dengan capaian bantuan langsung Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G) dengan target yang ditetapkan sebesar 4000 keluarga penerima manfaat (KPM), dan pada tahun 2025 tercapai 9000 KPM. Sedangkan bantuan program penanganan fakir miskin yakni usaha ekonomi produktif (UEP) dan perempuan kepala keluarga (PEKKA) dengan target sebesar 500 KPM dengan capaian sebesar 737 KPM. Dengan dukungan atas kinerja tersebut, maka sasaran strategis ini mencapai 225 persen.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu aspek penting dalam menilai capaian kinerja perangkat daerah. Sumber daya yang digunakan meliputi sumber daya manusia, anggaran, waktu pelaksanaan, serta sarana dan prasarana pendukung kegiatan. Untuk mencapai sasaran strategis ***“Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Masyarakat”*** dengan indikator sasaran ***“Persentase Masyarakat Rentan Yang Mendapatkan Perlindungan Sosial”*** diperlukan realisasi dana sebesar Rp 21.124.492.381,- atau 92,25% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 22.897.897.120,-

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran berjalan, penggunaan anggaran pada umumnya telah dilaksanakan secara **efisien**, yang tercermin dari **realisasi anggaran yang tidak mencapai 100% namun mampu menghasilkan capaian kinerja yang sesuai atau melebihi target** yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pengendalian anggaran telah dilakukan secara optimal.

Tabel 3.5
Analisis Efisiensi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2025	Capaian Realisasi Anggaran	Efisien/Tidak Efisien
1	Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi masyarakat	Persentase warga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial.	100 %	99.98 %	0,02 (efisien)
2	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	117,91 %	95.46 %	22,45 (efisien)

3	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang inklusif	Indeks kesejahteraan sosial	99,40 %	97,16%	2,24 (efisien)
4	Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat	Persentase masyarakat rentan yang mendapatkan perlindungan sosial	225 %	98,29%	126,71 (efisien)

Perhitungan tingkat efisiensi sebagaimana tabel efisiensi tersebut diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam mencapai sasaran Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif dan Meningkatkan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat, maka persentase realisasi anggaran dihitung dari rata-rata realisasi anggaran dari program yang mendukung indikator tersebut. Sementara itu, capaian kinerja adalah capaian tahun 2025 atas pencapaian target kinerja.
2. Efisiensi dihitung dengan membandingkan antara capaian realisasi anggaran dengan capaian kinerja.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Urusan Sosial :

1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Outcome dari program ini adalah

- **Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah**

Pelaksanaan Program :

1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub.Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Output:

- **Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Terlaksananya Kegiatan Forum OPD Urusan Sosial, Rakor SPM Urusan Sosial dan Penyusunan Renja
- Tersedianya data dan analisis perencanaan sebagai dasar penyusunan program/kegiatan perangkat daerah.

Sub.Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Output:

- **Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD** (Rencana Kerja dan Anggaran SKPD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Terlaksananya koordinasi internal dan eksternal** dalam rangka penyusunan RKA-SKPD.

Sub.Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Output:

- **Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja SKPD** sesuai dengan ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),
- Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sejumlah 8 laporan (LKPJ, LPPD, SPM, LAKIP, SAKIP RB, RENJA, SPIP, DATA SEKTOR)
- Tersusunnya Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebagai bagian dari pelaporan kinerja tahunan.
- Terlaksananya koordinasi internal dan eksternal dalam rangka pengumpulan data, verifikasi, dan penyusunan laporan kinerja.

Sub.Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Output :

- Tersusunnya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah sejumlah 4 laporan
- **Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah** secara periodik sesuai pedoman SAKIP/PermenPANRB.
- **Tersusunnya laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah** lengkap dengan rekomendasi perbaikan.

2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub.Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Output:

- Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 69 Orang

Sub.Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Output:

- Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen

Sub.Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Output:

- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan

3. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub.Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Output:

- Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya sejumlah 1 Paket

Sub.Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Output:

- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 26 orang

4. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub.Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Output:

- **Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan** untuk menunjang operasional bangunan kantor 3 paket

Sub.Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output:

- **Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor** untuk mendukung operasional perangkat daerah sejumlah 2 paket
- **Peralatan dan perlengkapan kantor yang terdistribusi** kepada unit bidang pengguna.

Sub.Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Output:

- **Tersedianya bahan logistik kantor** untuk mendukung kelancaran operasional perangkat daerah sejumlah 3 paket
- **Bahan logistik yang terdistribusi** kepada unit bidang sesuai kebutuhan

Sub.Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Output:

- **Tersedianya barang cetakan dan hasil penggandaan** untuk mendukung administrasi dan pelayanan perangkat daerah sejumlah 4 paket

Sub.Kegiatan : Penyediaan Bahan / Material

Output:

- **Tersedianya bahan/material** yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah sejumlah 3 paket

Sub.Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu

Output:

- Terlaksananya pelayanan penerimaan tamu/kunjungan kerja dengan baik dan sesuai standar 1 laporan

Sub.Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Output:

- Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi antar perangkat daerah/instansi sebanyak 3 laporan

5. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub.Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Output:

- Tersedianya kendaraan dinas jabatan/perorangan dinas sesuai kebutuhan perangkat daerah sejumlah 1 unit
- Meningkatnya mobilitas dan efektivitas penyelenggaraan tugas kedinasan melalui penyediaan sarana transportasi yang memadai

6. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub.Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Output:

- Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, seperti telepon, internet, dan layanan data untuk mendukung operasional perangkat daerah sebanyak 2 laporan
- Kontinuitas layanan operasional kantor terjaga melalui dukungan komunikasi, air, dan listrik yang tidak terputus.

Sub.Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Output:

- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 3 laporan
- Terselenggaranya pelayanan umum perkantoran untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah
- Tersedianya jasa operasional perkantoran seperti kebersihan, keamanan, pemeliharaan ringan, kurir, dan layanan pendukung lainnya

7. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub.Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Output:

- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya sebanyak 1 unit
- Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas (perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan) agar tetap layak dan siap operasional
- terselesaikannya pembayaran pajak kendaraan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub.Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanal atau Lapangan

Output:

- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayar kan Pajak dan Perizinannya sebanyak 12 Unit
- **Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional/lapangan** agar tetap berfungsi optimal dan siap digunakan.
- **Terselesaikannya pembayaran pajak, retribusi, dan biaya perizinan kendaraan dinas operasional** sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sub.Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Output:

- **Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin** (selain kendaraan dan peralatan khusus lainnya) agar tetap berfungsi optimal.
- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 40 Unit

Sub.Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Output:

- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
- Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya agar tetap layak fungsi, aman, dan nyaman digunakan

2). Program Pemberdayaan Sosial

Outcome dari program ini adalah

- Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial
- Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA
- Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar
- Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial
- Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial

Pelaksanaan Program :

1. Kegiatan : Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub.Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

Output:

- Terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi penerbitan ijin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang sejumlah 10 dokumen.

2. Kegiatan : Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi

Sub.Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi

Output:

- Terselenggaranya pelatihan peningkatan Kapasitas Kemampuan TKSK sejumlah 77 Orang.
- Terlaksanya verifikasi/pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja TKSK
- Terlaksananya rapat koordinasi antara pemerintah Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Sub.Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi

Output:

- Terlaksanya verifikasi/validasi KT dan LKSA penerima bantuan.
- Terselenggaranya bimbingan teknis penguatan Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebanyak 15 Lembaga.
- Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi sebanyak 20 Lembaga
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

3). Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Outcome dari program ini adalah

- Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani

a. Pelaksanaan Program :

1. Kegiatan : Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal

Sub.Kegiatan : Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal

Output:

- Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota sejumlah 5 Orang
- Terfasilitasinya pemenuhan kebutuhan dasar sementara (akomodasi, makanan, kebutuhan, personal, layanan Kesehatan dasar, dan dukungan psikososial)
- Terlaksananya proses koordinasi dengan pemerintah kab/kota asal dan instansi terkait untuk memastikan pemulangan aman.
- Terlaksananya pemulangan kedaerah Asal.

4). Program Rehabilitasi Sosial

Outcome dari program ini adalah

- Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
- Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
- Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
- Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
- Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti
- Persentase sarana prasarana yang disediakan bagi peyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan/atau gelandangan dan pengemis didalam panti yang layak dan sesuai standar
- Persentase sarana prasarana bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang disediakan secara layak dan sesuai standar

Pelaksanaan Program :**1. Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti**

Sub.Kegiatan : Penyediaan Permakanan

Output:

- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi sebanyak 25 orang disabilitas
- Tersedianya layanan pemenuhan makanan sehari-hari sejumlah
- Terpenuhinya kebutuhan bagi penyandang disabilitas
- Terjaminnya kualitas dan keamanan makanan

Sub.Kegiatan : Penyediaan Sandang

Output:

- Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi sebanyak 10 orang
- Tersedianya paket sandang kepada lansia didalam panti sejumlah
- Tersedianya sandang yang layak dan memenuhi standar

Sub.Kegiatan : Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses

Output:

- Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi sebanyak 5 orang klien disabilitas
- Tersedianya ruang asrama yang layak dan ramah akses (ketersediaan kamar tidur, ruang istirahat, dan area bersama yang bersih dan terawat yang berpenuhi

Sub.Kegiatan : Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti

Output:

- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi sebanyak 5 orang

- Tersedianya perbekalan Kesehatan bagi Lansia didalam panti (obat-obatan dasar, vitamin dan suplemen sesuai kebutuhan sejumlah
- Tersedianya alat Kesehatan sederhana seperti tensimeter, thermometer, kursi roda, alat cek gula darah dan peralatan P3K.

Sub.Kegiatan : Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari – Hari

Output:

- Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi sebanyak 5 orang
- Terlaksananya Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari Kewenangan Provinsi

Sub.Kegiatan : Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Output:

- Jumlah orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi sebanyak 5 orang
- Teraksesnya layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar

Sub.Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar

Output:

- Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar 2 Dokumen

2. Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti

Sub.Kegiatan : Penyediaan Makanan

Output :

- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi sejumlah 45 Orang

Sub.Kegiatan : Penyediaan Sandang

Output :

- Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi 45 Orang

Sub.Kegiatan : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

Output :

- Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi sejumlah 45 Orang

Sub.Kegiatan : Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari

Output :

- Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi sejumlah 45 Orang

Sub.Kegiatan : Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Output :

- Jumlah orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi 45 Orang

Sub.Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti

Output :

- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti 2 dokumen

3. Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti

Sub.Kegiatan : Penyediaan Permakanan

Output :

- Tersedianya layanan pemenuhan makanan sehari-hari sejumlah 55 Orang
- Terpenuhinya kebutuhan gizi lansia
- Terjaminnya kualitas dan keamanan makanan

Sub.Kegiatan : Penyediaan Sandang

Output :

- Tersedianya paket sandang kepada lansia didalam panti sejumlah 23 orang
- Tersedianya sandang yang layak dan memenuhi standar

Sub.Kegiatan : Penyediaan Asrama yang Mudah diakses

Output:

- Tersedianya ruang asrama yang layak dan ramah akses (ketersediaan kamar tidur, ruang istirahat, dan area bersama yang bersih dan terawat yang dipenuhi sejumlah 23 Orang

Sub.Kegiatan : Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial

Output:

- Tersedianya perbekalan Kesehatan bagi Lansia didalam panti (obat-obatan dasar, vitamin dan suplemen sesuai kebutuhan sejumlah 23 orang.
- Tersedianya alat Kesehatan sederhana seperti tensimeter, thermometer, kursi roda, alat cek gula darah dan peralatan P3K.

Sub.Kegiatan : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial

Output:

- Terlaksananya Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi sejumlah 23 Lansia

Sub.Kegiatan : Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari - Hari

Output:

- Terlaksananya Bimbingan Aktivitas Hidup Sehar-hari Kewenangan Provinsi sejumlah 23 Lansia

Sub.Kegiatan : Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Output:

- Teraksesnya layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar sejumlah 23 Lansia

Sub.Kegiatan : Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

Output:

- Terlaksananya Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi sejumlah 9 Orang

Sub.Kegiatan : Pemulasaraan

Output:

- Terlaksananya Pemulasaran sebanyak 2 Orang

Sub.Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Pant

Output:

- Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar 2 Dokumen

4. Kegiatan : Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant

Sub.Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA

Output:

- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Provinsi sejumlah 2 dokumen.
- Terlaksananya pemberian hibah kepada Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Korban Penyalahgunaan Napza (KPN)
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi bagi Eks Rehabilitasi Sosial di IPWL

5). Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Outcome dari program ini adalah

- Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar
- Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi
- Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin

a. Pelaksanaan Program :

1. Kegiatan : Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal

Sub.Kegiatan : Pengangkatan Anak antar WNI

Output:

- Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi sejumlah 29 Anak
- Terselenggaranya proses pelayanan pengangkatan anak sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Tersusunya berkas kelengkapan administrasi Calon Orang Tua Angkat (COTA)
- Terlaksanya asesmen social terhadap COTA oleh Pekerja Sosial
- Terbitnya rekomendasi kelayakan pengangkatan anak dari Dinas Sosial/Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA)

2. Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi

Sub.Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Output:

- Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi (BLP3G) sejumlah 9.000 KPM
- Tersalurkannya bantuan social kesejahteraan keluarga sesuai kriteria dan jumlah penerima yang ditetapkan.
- Terselenggaranya koordinasi lintas sector (desa/kelurahan, kecamatan, provinsi, Lembaga terkait) untuk mendukung kelancaran penyaluran bantuan.
- Tersedianya laporan pelaksanaan fasilitasi bantuan mulai dari perencanaan, penyaluran, hingga capaian akhir program.

Sub.Kegiatan : Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Output:

- Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota(bantuan UEP dan PEKKA) sejumlah 737 KPM.
- Terverifikasinya calon penerima bantuan sesuai dengan ketentuan
- Terselenggaranya bimtek atau fasilitasi dan pembinaan usaha bagi penerima bantuan

Sub.Kegiatan : Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Output:

- Terlaksananya evaluasi calon penerima bantuan UEP dan PEKKA Pengembangan yang sudah diberikan bantuan 2 tahun sebelumnya kurang lebih 800 KPM dari 2995 KPM
- Terselurnya bantuan UEP dan PEKKA pengembangan sejumlah 6 KPM hasil dari evaluasi dengan anggaran yang tersedia.

6). Program Penanganan Bencana

Outcome dari program ini adalah

- Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi
- Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya
- Persentase sarana prasarana bagi korban bencana yang disediakan sesuai standar
- Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial

Pelaksanaan Program :

1. Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

Sub.Kegiatan : Penyediaan Permakanan

Output:

- Tersedianya makanan siap saji bagi korban bencana sejumlah 6659 Orang.
- Terselurkannya bantuan permakanan sesuai standar gizi tepat jumlah dan sasaran
- Tersedianya dapur umum/dapur lapangan yang berfungsi dengan baik
- Terselenggaranya layanan makanan darurat selama masa tanggap darurat
- Terlayannya masyarakat korban bencana dengan baik

Sub.Kegiatan : Penyediaan Sandang

Output:

- Tersedianya bantuan sandang bagi korban bencana sejumlah 930 Paket.
- Tersedianya paket sandang dasar pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana
- Terdistribusinya pakaian layak pakai sesuai kebutuhan korban

Sub.Kegiatan : Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi

Output:

- Tersedianya tempat penampungan pengungsi yang aman dan layak sejumlah 6 Unit.
- Terbangunnya/Tersedianya tenda pengungsi, shelter sementara atau Gedung yang difungsikan sebagai posko

Sub.Kegiatan : Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

Output:

- Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi sebanyak 503 orang
- Tersedianya layanan khusus bagi kelompok rentan dilokasi pengungsian
- Tersedianya bantuan khusus (makanan tambahan, susu formula, kids ware, ibu hamil, lansia dan disabilitas).
- Kelompok rentan mendapatkan pendampingan dan perlindungan sesuai kebutuhannya.

Sub.Kegiatan : Pelayanan Dukungan Psikososial

Output:

- Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi sebanyak 160 orang
- Terselenggaranya layanan dukungan psikososial bagi korban bencana
- Terselenggaranya aktivitas pemulihan emosi untuk anak, dewasa, dan kelompok rentan.
- Tersedianya fasilitator atau tenaga pendamping psikososial (Tagana/psikolog/pendamping social).

7). Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

- Persentase taman makam pahlawan nasional yang dikelola dengan baik

a. Pelaksanaan Program :

1. Kegiatan : Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

Sub.Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

Output:

- Terselenggaranya Pengelolaan TMP Nasional Provinsi secara tertib, bersih dan terawat
- Terselenggaranya perawatan rutin makam, taman dan fasilitas umum sejumlah 2 Makam
- Terselenggaranya layanan pemakaman bagi pahlawan/pejuang sesuai ketentuan

- Terselenggaranya upacara kenegaraan (Hari Patriotik, HUT RI, Hari Pahlawan) di TMP dengan baik.

Tersusunya Buku Pahlawan dengan Judul "INDONESIA MERDEKA
DIGORONTALO : Nani Wartabone, 23 Januari 1942 dan Keindonesiaan

B. REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2025 sebesar Rp - (92.25%) Adapun rincian total realisasi anggaran yang dikelola Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2025 sebagai berikut :

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah)

Alokasi anggaran Dinas Sosial Provinsi Gorontalo pada tahun 2025 sampai dengan perubahan APBD sebesar Rp. 22.897.897.120,00 dengan rincian jenis belanja, sebagai berikut :

- Belanja Pegawai : Rp 8.622.320.192,00 (37,65%)
- Belanja Barang dan Jasa : Rp 13.580.743.928,00 (59,31%)
- Belanja Modal : Rp. 694.833.000,00 (3,03%)

Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp. 21.124.492.381,00 atau **92,25%**. Terdiri dari :

- Belanja Pegawai : Rp 8.000.414.262,00 (37,87%)
- Belanja Barang dan Jasa : Rp 12.430.839.689,00 (58,84%)
- Belanja Modal : Rp. 693.238.430,00 (3,28%)

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025 telah mencukupi.

Selanjutnya, dibawah ini disajikan secara lengkap realisasi anggaran Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2025, sebagaimana tabel 3.6 sebagai berikut:

TABEL
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN URUSAN SOSIAL
TAHUN 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU 2025 (Rp)	REALISASI TAHUN 2025			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.391.186.241	10.460.364.938	91.83	99.02		
a.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	547.892.249	542.092.619	98.94	99.24		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	440.348.749	435.110.715	98.81	99.06		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.450.000	9.315.646	98.58	100		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.876.000	22.798.020	99.66	100		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.217.500	74.868.238	99.54	100		
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.745.434.192	8.121.908.856	92.87	99.93		

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU 2025 (Rp)	REALISASI TAHUN 2025			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.622.320.192	8.000.414.262	92.79	100		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	110.550.000	109.517.594	99.07	94.86		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.564.000	11.977.000	95.33	96.27		
c.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	65.053.000	64.845.760	99.68	99.68		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.000.000	10.000.000	100	100		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	55.053.000	54.845.760	99.62	99.62		
d.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	126.992.000	122.650.788	96.58	99.17		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.913.000	14.862.206	99.66	99.65		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.330.000	9.763.081	94.51	94.70		

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU 2025 (Rp)	REALISASI TAHUN 2025			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
g.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	660.564.800	476.805.438	72.18	85.79		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	84.680.000	42.849.662	50.60	51.09		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	329.690.800	223.221.345	67.71	96.52		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	121.724.000	87.084.431	71.54	66.33		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	124.470.000	123.650.000	99.34	100		
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.129.666.431	953.918.207	84.44	84.92		
a.	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	77.158.000	61.807.977	80.11	84.32	- Masih kurangnya sosialisasi kepada para pelaksana urusan - banyak yang tidak mentaati aturan izin PUB	- Perlu adanya sosialisas UGB dan terhadap para penyelenggaraan PUB

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU 2025 (Rp)	REALISASI TAHUN 2025			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	77.158.000	61.807.977	80.11	84.32		
b.	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1.052.508.431	892.110.230	84.76	84.97	- Kurangnya kapasitas dan keterampilan organisasi Karang Taruna sehingga usaha yang diberikan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan	- Diberikan bimbingan teknis atau penguatan terhadap organisasi Karang Taruna
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	735.629.600	625.598.230	85.04	85.32		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	316.878.831	266.512.000	84.11	84.15		
3.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	115.831.850	101.280.625	87.44	87.47		
a.	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	115.831.850	101.280.625	87.44	87.47	- Prosedur pemulangan yang belum dipahami oleh kab/kota sehingga klien langsung dirujuk ke Provinsi - Belum tersedia rumah singga di beberapa kab/kota	- Sosialisasi ke kab/kota tentang SOP pemulangan - Kab/kota harus menyiapkan rumah singgah sebagai rumah perlindungan sementara sebelum dirujuk
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	115.831.850	101.280.625	87.44	87.47		

4.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.058.442.942	2.922.945.108	95.57	95.62		
a.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	501.820.800	445.445.608	88.77	88.87	- Bel um Tersedianya Panti Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar sebagai pelaksana teknis Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, selama ini kami masih menyewa gedung untuk pelayanan rehabilitasi social penyandang disabilitas terlantar didalam panti.	- Perlunya pembangunan Panti Sosial Terpadu untuk pemenuhan layanan rehabilitasi sosial dalam panti bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Gelandangan dan Pengemis, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Disabilitas Terlantar.
	Penyediaan Permakanan	194.340.000	152.069.000	78.25	78.25		
	Penyediaan Sandang	38.764.000	38.753.430	99.97	100		
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	49.339.500	41.940.508	85	85.73		
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	2.000.000	1.998.980	99.95	100		
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	175.630.000	173.874.650	99	99.08		
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	4.000.000	-	-	-		

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar		36.809.040	97.51	97.63		
b.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.035.452.400	1.012.814.750	97.81	97.63	- Belum tersedianya Panti Sosial Anak Terlantar atau Lembaga Pengasuhan Anak sebagai pelaksana teknis Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dalam upaya perlindungan, pengasuhan, pengembangan dan rehabilitasi sosial bagi Anak Terlantar untuk meningkatkan persentase Anak Terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak-haknya dan mampu berfungsi sosial	- Menjalin kerjasama dengan 2 (dua) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yaitu LKSA Titian Umat Muslim Kota Gorontalo dan LKSA Darul Mutmain Tabongo untuk pemenuhan layanan rehabilitasi sosial dasar Anak dalam panti
	Penyediaan Makanan	573.350.000	558.942.850	97.49	97.49		
	Penyediaan Sandang	55.000.000	54.994.750	99.99	100		
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	44.066.000	43.965.450	97.99	100		
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	42.975.000	42.974.500	100	100		
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	30.500.000	22.500.000	73.77	73.77		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	289.561.400	289.437.200	99.96	99.98		

c.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.195.253.742	1.139.591.950	95.34	95.40	- Belum Tersedianya Panti Sosial Lanjut Usia Terlantar sebagai pelaksana teknis Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, selama ini kami masih menyewa gedung untuk pelayanan rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar dalam panti	- Perlunya pembangunan Panti Sosial Terpadu untuk pemenuhan layanan rehabilitasi sosial dalam panti bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Gelandangan dan Pengemis, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Disabilitas Terlantar.
	Penyediaan Permakanan	300.000.000	295.124.984	98.37	98.43		
	Penyediaan Sandang	100.000.000	89.696.166	89.70	89.69		
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	169.911.000	164.653.060	96.91	96.93		
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	4.000.000	4.000.000	100	100		
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	192.609.000	185.179.738	96.14	96.15		
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	323.777.500	323.198.802	99.82	99.92		
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	6.000.000	-	-	-		
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	25.265.000	21.226.600	84.02	84.17		
	Pemulasaraan	20.000.000	5.000.000	25	25		

	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	53.691.242	51.512.600	95.94	96.06		
d.	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	325.916.000	325.092.800	99.75	99.83		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	325.916.000	325.092.800	99.75	99.83		
5.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	5.577.580.656	5.341.147.169	96.99	98.36		
a.	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	91.658.900	85.856.900	93.67	93.67		
	Pengangkatan Anak antar WNI	91.658.900	85.856.900	93.67	93.67		
b.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	5.485.921.756	5.305.290.269	96.71	98.43		
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3.007.274.021	2.931.756.605	97.49	100		
	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.393.452.735	2.290.579.164	95.70	96.41		
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	85.195.000	82.954.500	97.37	99.93		
6.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.171.422.500	864.572.766	73.81	91.03		

a.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.171.422.500	864.572.766	73.81	91.03	-	Ter batasnya anggaran operasional untuk mendukung kegiatan Penanggulangan Bencana	- Memastikan program dan anggaran daerah diprioritaskan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan penanggulangan bencana
	Penyediaan Permakanan	697.552.500	611.418.800	87.65	100			
	Penyediaan Sandang	245.000.000	199.407.000	81.39	100			
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	140.000.000	-	-	25			
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	73.580.000	44.033.466	59.84	100			
	Pelayanan Dukungan Psikososial	15.290.000	9.713.500	63.53	99.54			
7.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	453.766.500	453.766.500	94.82	99.44			
a.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	453.766.500	453.766.500	94.82	99.44	-	Kurangnya fasilitas/sarana penunjang yang tersedia dalam penguburan di TMP	- Diperlukan adanya penganggaran di tahun berikutnya untuk mendukung sarana penunjang
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	453.766.500	453.766.500	94.82	99.44			
JUMLAH		22.897.897.120	21.124.492.381	92.26	97.25			

BAB IV

PENUTUP

Secara umum, Dinas Sosial Provinsi Gorontalo telah berupaya merealisasikan program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kinerja Tahun 2025 untuk tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dan khususnya yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam bab III dapat dilihat bahwa, nilai capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dengan dari 1(satu) sasaran strategis dan 2(dua) indikator kinerja, pencapaian target kinerjanya berada pada kategori baik.

1. Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif dengan indicator kinerja Indeks Kesejahteraan Sosial tahun 2025 dengan realisasi 99,40% dengan Capaian tahun 2025 sebesar 100%, demikian juga bila dibandingkan dengan target renstra 80%.
2. Sasaran Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi masyarakat dengan indicator kinerja Persentase Masyarakat rentan yang mendapatkan perlindungan sosial tahun 2025 dengan realisasi 225% dengan Capaian tahun 2025 sebesar 100%, demikian juga dengan target renstra 100%.

3. Berdasarkan simpulan tersebut di atas beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian Dinas Sosial Provinsi Gorontalo untuk peningkatan kinerjanya ke depan, adalah sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan kebijakan peraturan tentang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan social.
2. Meningkatkan koordinasi antara pihak yang terkait agar pengevaluasian terhadap program-program yang telah dijalankan dapat berjalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

3. Mengoptimalkan pembinaan kepada PMKS dengan sumberdaya yang ada.
4. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui usulan penambahan pegawai PNS, pembinaan, pendidikan, dan pelatihan dalam upaya pemenuhan kebutuhan SDM yang lebih profesional baik untuk pegawai PNS dan non PNS.
5. Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan program/kegiatan.
6. Lebih meningkatkan kinerja PNS dan Non PNS untuk mencapai target yang telah ditetapkan.